

SIARAN PERS

THE 4th G20 INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE WORKING GROUP MEETING

Kementerian Keuangan kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Internasional Forum G20, yaitu *the 4th G20 Investment and Infrastructure Working Group* (IIWG) yang bertempat di Hotel Pullman Central Park Jakarta tanggal 28-29 Agustus 2014. IIWG merupakan salah satu kelompok kerja utama G20 di bawah Kerangka Kerja Sama para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, yang diberikan tugas merumuskan dan merekomendasikan prinsip-prinsip kerja sama dan formulasi kebijakan investasi infrastruktur global. Indonesia bersama Jerman dan Meksiko dipilih sebagai Ketua Kelompok Kerja tersebut bekerja sama dengan Australia sebagai Negara Ketua Forum G20 tahun 2014. Pertemuan dihadiri oleh 20 negara anggota G20 dan sejumlah negara undangan, serta beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional terkemuka seperti Bank Dunia, IMF, ADB, IDB, OECD, IOSCO, Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), European Investment Bank (EIB) serta Bank Pembangunan Eropa (EBRD). Pertemuan di Jakarta ini merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan di Meksiko, Australia, dan Singapura.

Dalam pertemuan dua hari tersebut, dibahas sejumlah agenda penting yang dibagi ke dalam empat elemen utama, yaitu peningkatan iklim investasi jangka panjang, intermediasi aliran keuangan ke dalam proyek-proyek investasi infrastruktur, peran lembaga keuangan multilateral dalam mendukung peningkatan investasi infrastruktur, dan prioritas dan peningkatan kapasitas penyiapan perencanaan proyek-proyek infrastruktur. Secara lebih spesifik, negara-negara anggota G20 membahas rumusan dan butir-butir kesepakatan terkait kerja sama investasi infrastruktur di negara-negara G20 dan global yang akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada Pertemuan para Menteri Keuangan pada bulan September 2014 di Cairns, dan KTT Pemimpin G20 di Brisbane, Australia pada bulan November 2014.

Negara-negara anggota G20 secara prinsip menyepakati pentingnya dibangun satu platform global untuk merumuskan peran publik dan sektor swasta di dalam investasi jangka panjang khususnya proyek-proyek infrastruktur. Platform ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang, melalui peningkatan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendorong kegiatan ekonomi ke depan. Salah satu aspek penting yang mendapat dukungan luas selama pertemuan yaitu pembentukan lembaga yang berfokus pada kegiatan *knowledge sharing* dan *exchange of information* dalam bidang investasi infrastruktur, termasuk dalam penyiapan perencanaan dan penyusunan struktur proyek. Namun demikian, sebagian negara anggota masih memperdebatkan struktur dari platform yang akan dibentuk tersebut mengingat kerangka kerja sama yang serupa sudah dilakukan sebelumnya dan adanya kemungkinan tumpang tindih dengan peran dan wewenang dari lembaga-lembaga keuangan multilateral yang sudah ada selama ini seperti Bank Dunia, ADB, IDB dan lain-lain. Oleh karenanya, IIWG masih akan terus membahas bentuk kerja sama yang paling tepat untuk dijadikan rekomendasi kepada para Pemimpin G20 untuk disepakati sebagai komitmen global dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan global dalam jangka panjang, termasuk upaya pengurangan kesenjangan ekonomi dan pembangunan saat ini.

Indonesia sendiri telah berperan aktif di dalam pembahasan rumusan berbagai agenda di G20. Investasi infrastruktur merupakan salah satu agenda yang secara konsisten telah didorong oleh Indonesia bahkan sejak tahun 2011 diperjuangkan secara serius untuk menjadi agenda prioritas di

Forum G20. Melalui peran aktif tersebut, Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional untuk peningkatan kapasitas ekonomi domestik melalui peningkatan pembiayaan di sektor infrastruktur sekaligus membantu negara-negara berkembang lain di luar G20 untuk mendapatkan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, termasuk pembiayaan oleh sektor swasta, yang diperlukan untuk mendukung program-program pembangunan nasionalnya.

Informasi lebih lanjut:

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Agustus 2014